



ANALISIS FENOMENA GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024

Diah Ayu Pratiwi¹

¹Universitas Bina Bangsa

Email: diah_mahdan@yahoo.co.id

Abstrak

Angka Golongan Putih (Golput) yang semakin meningkat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi perhatian serius dalam menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa penyebab fenomena Golput dalam Pilkada dengan pendekatan holistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan berbagai informasi rujukan ilmiah dari sumber primer dan sekunder melalui dokumen yang relevan dengan kajian penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap apatisisme politik dan pilihan rasional pemilih menjadi penyebab angka Golput Pilkada meningkat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran politik dan memastikan bahwa setiap warga negara menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang.

Kata kunci: Golput; Pilkada; Perilaku Pemilih

Abstract

The increasing number of White Groups (Golput) in the Regional Head Election (Pilkada) is a serious concern in maintaining the health of democracy in Indonesia. This study aims to analyze the causes of the Golput phenomenon in the Regional Elections with a holistic approach. This study uses a qualitative research method, with data collection techniques using various scientific reference information from primary and secondary sources through documents relevant to the research study. The results of the study show that political apathy and rational choices of voters are the cause of the increase in the number of Golput Pilkada. Therefore, more effective strategies are needed to increase political awareness and ensure that every citizen exercises his or her right to vote in the upcoming elections.

Keywords: Golput; Elections; Voter Behavior

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih secara langsung pemimpin daerah mereka, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pilkada berperan penting dalam menentukan arah kebijakan daerah yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan meningkatnya angka Golongan Putih (Golput) atau masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 secara nasional berada di bawah 71% (Kompas, 2024), menurun dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 mencapai 76,09% (Merdeka.com, 2020). Selain itu, angka partisipasi pemilih bervariasi di berbagai daerah,

namun dalam beberapa kasus, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya cukup signifikan. Di Jakarta, angka Golput mencapai 3.489.614 orang atau 42,48 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 orang. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan dengan Pilkada Jakarta 2017, dimana angka Golput tercatat sebanyak 1.654.854 orang atau sekitar 22,9 persen dari total pemilih (CNNIndonesia.com, 2024). Provinsi lain juga mengalami peningkatan angka Golput yang signifikan. Di Sumatera Utara, partisipasi pemilih hanya mencapai 49,32 persen, dengan 5.312.561 orang dari total DPT 10.771.496 orang menggunakan hak pilihnya, sehingga angka Golput mencapai 50,68 persen; Partisipasi pemilih Pilkada Jawa Barat 63,02%, Golput 36,98%; Pilkada Jawa Tengah partisipasi pemilih 70,52%, angka Golput 29,48%; Pilkada Banten partisipasi pemilih 63,90%, angka Golput 36,10%. Sementara itu, di Jawa Timur, angka Golput mencapai 34,67 persen dari total DPT 31.280.418 orang (Detik.com, 2024; CNNIndonesia.com, 2024).

Pergeseran perilaku pemilih dalam beberapa pilkada di berbagai daerah menunjukkan kecenderungan pemilih tidak hanya menentukan pilihannya berdasarkan identifikasi kepartaian, melainkan mulai menggunakan isu dan performa kandidat sebagai referensi pilihannya. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan pada loyalitas partai kini telah bergeser akibat adanya ketidakpercayaan (*distrust*) kepada partai dan figur calon dengan cara melakukan *nonvoting* (Golput) dan *protest voting*, dengan memilih figur-figur alternatif yang kebanyakan dicalonkan oleh partai kecil dan menengah.

Potensi Golput yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat merugikan kualitas demokrasi secara keseluruhan, hal ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan rendahnya kesadaran politik. Rendahnya partisipasi pemilih berdampak pada legitimasi pemimpin terpilih dan rendahnya keterwakilan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan daerah (Abdurrahman, 2014; Taun, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah berupaya untuk meneliti fenomena Golput di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel-variabel seperti keterlibatan dalam aktivitas politik, usia, tingkat pendidikan, dan status ekonomi yang mempengaruhi perilaku memilih. Selain itu, beberapa penelitian telah meneliti variasi partisipasi pemilih dalam berbagai pemilu dan menghubungkannya dengan perubahan sosial di bidang sosial, politik, dan ekonomi (Nazaruddin & Warsono, 2021; Hutabalian & Budiman, 2022). Meskipun sudah ada beberapa analisis, namun masih terdapat kesenjangan dalam penelitian ini, khususnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola Golput dalam Pilkada 2024 serta merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab Golput dalam Pilkada 2024. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena Golput serta rekomendasi strategi yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu di masa mendatang, sehingga kontribusi demokrasi dapat diperkuat dan kepercayaan publik terhadap sistem politik dapat ditingkatkan.

Perilaku pemilih merupakan salah satu bentuk dari perilaku politik, yang berkaitan dengan keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang menjadi serangkaian kegiatan membuat keputusan untuk memilih atau tidak memilih (Surbakti, 1999). Sementara itu, menurut Huntington dan Nelson (1976) bahwa perilaku pemilih disebut sebagai electoral activity, yakni pemberian suara (votes), bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon atau tindakan lain yang direncanakan guna mempengaruhi pemilihan umum.

Selanjutnya, perilaku pemilih dalam penelitian ini dikaitkan dengan keputusan dalam proses pemungutan atau pemberian suara (voting) untuk memilih atau tidak dalam pemilihan umum. Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan tersebut diberikan karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat pemberian suara. Nilai yang dimaksud disini adalah preferensi yang dimiliki seseorang (konstetan pemilu) atau organisasi terhadap tujuan tertentu atau acara tertentu melaksanakan sesuatu. Sehingga, kepercayaan pemberi suara akan ada, apabila seseorang telah memahami makna nilai dalam rangka mencapai tujuan. Begitupun sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki rasa percaya terhadap seseorang atau pun organisasi, maka memutuskan untuk tidak memilih dalam pemilu. Terdapat tiga model utama yang dapat digunakan untuk menjelaskan individu mengambil keputusan dalam menentukan pilihannya dalam suatu pemilu, dimana setiap model menyoroti aspek yang berbeda dari perilaku pemilih, baik yang berhubungan dengan faktor sosial, psikologis, maupun kalkulasi rasional yang dilakukan oleh pemilih sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan pada kandidat atau partai tertentu.

1. Model Sosiologis. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Paul Lazarsfeld pada tahun 1944, yang menyatakan bahwa pilihan politik seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelas ekonomi, agama, etnisitas, serta lingkungan sosial tempat individu tersebut berada. Model ini berargumen bahwa individu, dalam menentukan preferensi politiknya, cenderung mengikuti pola yang berlaku dalam kelompok sosial mereka; misalnya, seseorang yang berasal dari keluarga dengan latar belakang kelas pekerja dan memiliki afiliasi agama

tertentu kemungkinan besar akan memilih kandidat atau partai yang dianggap mewakili kepentingan kelompok sosialnya tersebut.

2. Model Psikologis. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Angus Campbell pada tahun 1960, menekankan bahwa keputusan memilih tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial yang bersifat eksternal, tetapi juga oleh faktor psikologis yang bersumber dari keterikatan emosional dan persepsi individu terhadap partai atau kandidat yang bersaing dalam pemilu; dalam konteks ini, konsep party identification atau identifikasi partai menjadi elemen kunci dalam menjelaskan bagaimana seseorang memilih dalam pemilu, di mana individu yang telah memiliki afiliasi kuat terhadap suatu partai cenderung akan tetap memilih partai tersebut dalam berbagai kesempatan, meskipun ada perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, atau politik yang terjadi di sekitarnya.

3. Model Pilihan Rasional. Model ini dikembangkan oleh Anthony Downs (1957), berpendapat bahwa pemilih bertindak sebagai aktor rasional yang melakukan kalkulasi untung-rugi sebelum menentukan pilihannya dalam pemilu; dalam model ini, pemilih dianggap sebagai individu yang mempertimbangkan manfaat maksimal yang dapat mereka peroleh dari kebijakan yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat atau partai, sehingga keputusan mereka dalam memilih sangat bergantung pada analisis rasional mengenai bagaimana kandidat yang dipilih dapat memenuhi kepentingan pribadi mereka, baik dalam aspek ekonomi, kesejahteraan, maupun kebijakan publik lainnya.

Dalam literatur perilaku pemilih, penjelasan Golput mengacu pada perilaku non-voting. Perilaku non-voting umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tidak adanya motivasi. Menurut David Moon bahwa ada dua pendekatan dalam menjelaskan perilaku non-voting yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih (dalam Hasanuddin M. Saleh, 2007). Golput adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau kelompok yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau pilkada. Istilah ini pertama kali muncul di Indonesia pada Pemilu 1971 sebagai bentuk protes politik terhadap sistem pemilu yang dianggap tidak demokratis.

Menurut Indra J. Piliang (2014) ada tiga kategori Golput, yaitu: (1) Golput Ideologis, merupakan Golput yang disebabkan penolakan terhadap sistem ketatanegaraan. Golongan ini menganggap pemilu sebagai bagian dari korporasi elit-elit politik yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi kedaulatan rakyat. (2) Golput Pragmatis. Golput yang didasarkan pada

perhitungan rasional, yang memandang pemilu tidak berdampak apapun pada diri pemilih. (3) Golput Politis, Golput yang disebabkan oleh faktor-faktor politik. Golput yang dilakukan oleh pendukung fanatik pasangan kandidat pemilu yang kalah dalam putaran pertama. Tapi sebenarnya kelompok ini masih percaya kepada Negara dan juga percaya pada pemilu. Hanya saja akibat preferensi politiknya berubah atau sistemnya secara sebagian juga merugikan mereka.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokratis sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di daerah dalam NKRI. Pilkada merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat dalam menentukan pemimpinnya di tingkat daerah. Menurut Ramlan Surbakti (1992) bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi, di mana masyarakat secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam menentukan pemimpin daerahnya, yang menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menekankan proses dan makna dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan studi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan dan pembahasan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi referensi ilmiah dari sumber primer dan sekunder melalui literatur terkait seperti: buku, jurnal dan media massa yang relevan terkait Golput di Indonesia. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menganalisis berbagai sudut pandang dan temuan dari berbagai sumber yang sudah ada untuk menyusun pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena Golput pada Pilkada 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilih dan Angka Golput pada Pilkada 2024

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, angka partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu 2024. Secara nasional, tingkat partisipasi pemilih berada di bawah 70 persen, lebih rendah dibandingkan 81,78 persen pada Pemilu 2024.

Beberapa daerah dengan tingkat Golput tinggi dalam Pilkada 2024 adalah:

- DKI Jakarta: 42,48% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.
- Sumatera Utara: 50,68% angka Golput.
- Jawa Timur: 34,67% tidak menggunakan hak pilihnya.

Tingginya angka Golput ini menunjukkan bahwa tantangan partisipasi politik masih menjadi isu utama dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

B. Faktor Penyebab Golput dalam Pilkada 2024

Berdasarkan pemaparan secara teoritis dan temuan hasil penelitian tentang fenomena golput didapat bahwa sikap apatisisme politik dan pilihan rasional pemilih menjadi penyebab utama meningkatnya angka Golput pada Pilkada 2024.

Apatisme politik merupakan ketidakpedulian masyarakat terhadap proses politik, yang ditandai dengan kurangnya minat dalam mengikuti isu-isu politik, tidak percaya pada institusi pemerintahan, dan tidak berpartisipasi dalam pemilu. Faktor penyebabnya adalah Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan politisi. Para pemilih merasa kecewa dengan pemerintahan sebelumnya dan tidak percaya kandidat akan membawa perubahan. Pemilih merasa bahwa semua kandidat hanya mencari kekuasaan tanpa benar-benar peduli dengan rakyat dan kasus korupsi yang sering terjadi membuat masyarakat semakin tidak percaya pada politisi. Kurangnya pendidikan politik dan sosialisasi politik menjadi salah satu sikap apatisisme pemilih. Banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman tentang pentingnya pemilu dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Hal ini berakibat pemilih merasa bahwa politik itu rumit dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari dan kurangnya sosialisasi tentang kandidat dan program mereka menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk memilih. Di daerah pedesaan atau komunitas tertentu, masih banyak warga yang tidak memahami bagaimana kebijakan politik bisa memengaruhi kesejahteraan mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak memilih.

Faktor lain, dominasi media sosial dan distraksi digital. Di era digital, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dengan konten hiburan daripada mengikuti berita politik. Sehingga, pemilih lebih tertarik pada tren media sosial dibandingkan dengan isu politik lokal. Selain itu, maraknya disinformasi dan berita palsu membuat masyarakat bingung dan akhirnya memilih untuk tidak memilih. Terakhir, kepuasan terhadap status quo. Beberapa pemilih memilih golput karena mereka merasa tidak ada masalah besar dalam pemerintahan saat ini, sehingga tidak perlu ikut serta dalam pemilu. Pemilih merasa bahwa pemerintahan yang sekarang sudah cukup baik, sehingga pemilu dianggap tidak terlalu penting. Tidak adanya kandidat yang membawa perubahan besar menyebabkan pemilih kehilangan minat dalam pemilu. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Penyebab lain fenomena Golput pada Pilakda 2024 adalah pilihan rasional pemilih. Dalam ilmu politik, teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menjelaskan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi (Downs, 1957). Dalam konteks golput dalam Pilkada 2024, banyak pemilih yang memilih untuk tidak memilih karena mereka secara sadar menilai bahwa golput adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi mereka dibandingkan dengan ikut serta dalam pemilu.

Faktor penyebab menggunakan pilihan rasional pada Pilkada 2024, yaitu tidak adanya kandidat yang memenuhi harapan pemilih. Jika pemilih tidak menemukan kandidat yang kompeten, memiliki integritas, atau membawa program yang sesuai, maka mereka bisa memilih untuk golput sebagai keputusan rasional. Sehingga, pemilih enggan memilih karena tidak ada kandidat yang dianggap layak. Golput dijadikan strategi untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia. Hal ini terjadi pada Pilkada di Jakarta, persentase warga yang tak menggunakan hak pilihnya atau golput pada Pilkada Jakarta 2024 mencapai jumlah tertinggi dalam sejarah pilkada Jakarta, yakni 3,4 juta suara. Bahkan, jumlah suara yang diperoleh pemenang jauh di bawah angka pemilih Golput (CNNIndonesia, 2024). Angka Golput yang tinggi disebabkan para pasangan calon yang bersaing di Pilkada Jakarta kurang sejalan dengan aspirasi politik warga dan elite lokal (Lubis, 2024).

Faktor lain dari pilihan rasional pemilih adalah biaya sosial dan ekonomi dalam pemilihan (*cost of voting*). Pemilih mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ikut serta dalam Pilkada, seperti pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS); mengorbankan waktu kerja atau aktivitas lain; mengantri dan menghadapi kemungkinan kendala administratif. Apabila biaya memilih lebih besar daripada manfaat yang dirasakan, pemilih rasional akan memilih Golput. Ketidakpercayaan terhadap sistem politik juga menjadi faktor penyebab pilihan rasional pemilih. Apabila pemilih merasa bahwa sistem politik korup, tidak transparan, dan hanya menguntungkan elite politik, maka mereka memilih Golput sebagai bentuk protes. Golput menjadi strategi politik untuk menunjukkan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi. Terakhir, pengaruh media sosial dan informasi digital menjadi penyebab pilihan rasional pemilih. Di era digital, pemilih lebih mudah mengakses informasi politik. Namun, peningkatan akses ini juga meningkatkan kesadaran kritis, yang membuat banyak pemilih menjadi lebih selektif dan akhirnya memilih Golput jika tidak menemukan kandidat yang sesuai. Pemilih yang aktif di media sosial lebih kritis terhadap janji politik dan lebih mungkin memilih golput jika merasa kandidat tidak kredibel. Penyebaran hoaks dan disinformasi juga dapat membuat pemilih bingung dan akhirnya memilih untuk tidak memilih sama sekali. Contohnya, pemilih

yang sering terpapar informasi di Twitter atau TikTok tentang rekam jejak negatif para kandidat mungkin akan kehilangan kepercayaan dan akhirnya memilih untuk golput.

KESIMPULAN

Fenomena Golput dalam Pilkada 2024 menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Sikap apatisme politik dan pilihan rasional pemilih menjadi penyebab utama tingginya angka Golput. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran politik, yaitu 1) meningkatkan kualitas calon pemimpin, dengan memperketat seleksi dan mendorong calon yang lebih kredibel serta memiliki rekam jejak yang baik; 2) sosialisasi pemilu yang lebih efektif, terutama melalui media sosial, agar masyarakat lebih memahami pentingnya menggunakan hak pilih; 3) peningkatan transparansi dalam proses pemilu, untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik; 4) mempermudah akses ke TPS, misalnya dengan sistem pemungutan suara berbasis teknologi atau perluasan lokasi TPS agar lebih mudah dijangkau; 5) pendidikan politik sejak dini, untuk membangun kesadaran politik masyarakat sejak usia muda agar lebih aktif dalam demokrasi. Melalui strategi ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. 2014. Partisipasi Politik Rakyat dan Fenomena Golongan Putih (Golput) pada Proses Pemilihan Umum di Indonesia. Gema Keadilan, 1(1).
- CNN Indonesia.com. 2024. Fenomena Golput Pilkada 2024 dan Potensi Krisis Legitimasi. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241210081527-617-1175608/fenomena-golput-pilkada-2024-dan-potensi-krisis-legitimasi?utm_source=
- Hutabalian, R. & E. A. Budiman. 2022. Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis Di Provinsi Papua Dalam Perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Ius Publicum, vol. 2, no. 2.
- Kompas. 2024. Mengapa Golput di Pilkada Tinggi?. https://www.kompas.id/artikel/mengapa-golput-di-pilkada-2024-tinggi?utm_source=m
- Merdeka.com. 2020. Deretan Panggung Pilkada Dimenangkan Golput. https://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-panggung-pilkada-dimenangkan-golput.html?utm_source=
- Nazaruddin, N & W. Warsono. 2021. Strategi Politik Partai Perindo Dalam Mendulang Suara Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. J. Polit. dan Pemerintah. Drh., vol. 3, no. 1.
- Piliang, Indra J. 2014. Golput dan Masyarakat Baru Indonesia. Diakses dari <http://64.203.71/kompas-cetak/04/07/08/opini/1163352.htm>.
- Taun, et.al. 2023. Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa. Civicus, 11(2).